

DOKUMEN

**LAPORAN
EVALUASI RENCANA AKSI**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

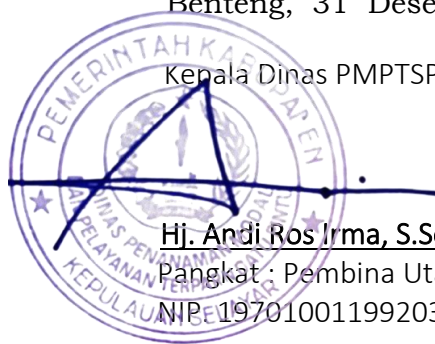
Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunianya, sehingga Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di susun.

Dokumen Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Dinas PMPTSP Tahun 2025 disusun sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan/kegagalan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025.

Benteng, 31 Desember 2025

Kepala Dinas PMPTSP



Hj. Andi Ros Irma, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda IV. C

NIP. 197010011992032013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan- perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya- upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah tersusunnya Laporan Realisasi Rencana Aksi untuk tahun 2025, dan tujuan disusunnya laporan Realisasi Rencana Aksi Tahun 2025 yaitu:

- a. Untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2025;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memberikan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya atas capaian kinerja pada Tahun 2025;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung menuju terwujudnya *good*

governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

BAB II RENCANA AKSI : 1. Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2021- 2026, Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Rencana Aksi.
2. Menyajikan capaian realisasi rencana aksi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 yang memuat hasil capaian kinerja (sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja

BAB III PENUTUP : Menyajikan kesimpulan atas capaian realisasi kinerja rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.

BAB II

RENCANA AKSI

2.1 Rencana Strategis Rencana Strategis (RENSTRA)

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) sebagaimana untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar serta menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021 s/d 2026 Dinas PMPTSP.

Dinas PMPTSP dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan yang menjadi tanggung jawabnya maka diperlukan langkah- Langkah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyiapan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas dan sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 maka Dinas PMPTSP mempunyai 2(dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi (T-1)

Sasaran : Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan (S-1)

Tujuan : Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman (T-5).

Sasaran : 1. Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6)

2. Meningkatnya Usaha Pariwisata (S-7)

3. Meningkatnya usaha Kepelabuhanan (S-8)

2.2. Indikaror Kinerja Utama (IKU)

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Dinas PMPTSP.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sesuai dengan Tujuan dan sasaran Renstra dan sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 maka Dinas PMPTSP mempunyai strategi dan arah kebijakan Serta indikator – indikator yang harus capai.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Adapun Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, startegi dan arah kebijakan adalah untuk menetapkan dan mencapai indikator sasaran, untuk mengukur indikator tersebut di jabarkan kembali menjadi indikator kinerja yang lebih menajam disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, persentase barang milik daerah yang terpelihara, Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti, Indek Akuntabilitas Kinerja dan Persentase realisasi Belanja Langsung dan Tidak langsung, yang dapat dilihat melalui table berikut:

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET 2025 |
|-----|---|---|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP | 75,00 (B) |
| | | | Nilai SAKIP Dinas PMPTSP | 75,00 (B) |
| | | | Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | Sesuai |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP | 80,00% |
| 2 | Meningkatkan Investasi | Meningkatnya kerjasama investasi | Persentase Peningkatan Nilai Investasi | 2,50 % |
| | | | Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 12,00% |
| | | | Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional | 20,00% |
| | | | Persentase peningkatan nilai investasi PMA | 8,00% |

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET 2025 |
|-----|--------|--|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif | Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik | 80,00% |

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. Oleh karena itu, Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, serta Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas PMPTSP Tahun 2021 – 2026. Pencapaian target pada Indikator Kinerja Utama tidak lepas dari program / kegiatan dan alokasi anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP. Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja dengan Program/Kegiatan dan Anggaran pada Dinas PMPTSP Tahun 2025 secara terinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2025

| NO. | NAMA PROGRAM/KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUN 2024 | | KET |
|-----|---|---------------------------|------------------------|-----|
| | | TARGET | ANGGARAN | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 70,53% | 4.131.052.400,- | |
| a. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 18.956.800,- | |

| NO. | NAMA PROGRAM/KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUN 2024 | | KET |
|-----------|---|-------------------------------|------------------------|-----|
| | | TARGET | ANGGARAN | |
| b. | Administiras2 Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 3.031.474.000,- | |
| c. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 11.000.000,- | |
| d. | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | - | |
| e. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 261.419.000,- | |
| f. | Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 515.057.600,- | |
| g. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 187.015.000,- | |
| h. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 106.130.000,- | |
| 2. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 60% | 10.000.000,- | |
| a. | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/Kota | 15 perusahaan | 10.000.000,- | |
| 3. | Program Promosi Penanaman modal | 32 Perusahaan/investor | 275.521.000,- | |
| a. | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 31 perusahaan/investor | 275.521.000,- | |
| 4. | Program Pelayanan Penanaman Modal | 100% | 135.020.000,- | |
| a. | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 135.020.000,- | |
| 5. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 67.000 juta rupiah | 140.000.600,- | |
| a. | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 67.000 juta rupiah | 140.000.600,- | |
| 6. | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 100% | 14.980.000,- | |
| a. | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi | 100% | 14.980.000,- | |
| | TOTAL | | 4.705.574.000,- | |

2.4. Rencana Aksi

Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2025 yang dituangkan secara berkala (per triwulan). Adapun Rencana Aksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran 1

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target 2025 | | | |
|-----|--|---------------------------------|-------------|-------|--------|--------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1 | Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah | Laporan Keuangan OPD sesuai SAP | - | - | - | Sesuai |

Rencana Aksi 1

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|-------|---------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota | 1. Persentase Capaian Kinerja (%) 2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%) | 25% | 25% | 25% | 25% | | |
| | Kegiatan 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 2 Dokumen | 1 Dokumen | - | 21.000.000,- | |
| | Sub Kegiatan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang ditetapkan | 2 Dokumen | | | | 3.000.000,- | Dokumen Renja 2025, Laporan Forum OPD, dan Dokumen Renja Perubahan 2025 |
| | Rencana Aksi : 1. Pengumpulan data, Menyusun draf Perjanjian Kinerja 2025, Casecadding 2025, Rencana Aksi 2025, dan Renja 2025 | | ✓ | - | - | - | | |
| | 2. Melaksanakan Forum OPD | | ✓ | - | - | - | | |
| | 3. Finalisasi Perjanjian Kinerja 2025, Casecadding 2025, Rencana Aksi 2025, dan Renja 2025 | | ✓ | - | - | - | | |
| | 4. Menginput Renja 2025 pada aplikasi | | ✓ | - | - | - | | |
| | Sub Kegiatan 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | - | - | - | 3.000.000,- | Dokumen RKA SKPD |
| | Rencana Aksi : | | ✓ | - | - | - | | |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|---|--|-----------|-------|-----------|-------|---|--------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| | 1. Membuat Pra RKA, menginput RKA di Aplikasi, Asistensi RKA, Reviu RKA | | | | | | | |
| | 2. Finalisasi RKA | | ✓ | - | - | - | | |
| | Sub Kegiatan 3 'Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | 1 Dokumen | - | 3.000.000,- Dokumen RKA Perubahan SKPD | |
| | Rencana Aksi : 1. Membuat Pra RKA Perubahan, menginput RKA Perubahan di Aplikasi, Asistensi RKA Perubahan, Reviu RKA Perubahan | | - | ✓ | - | - | | |
| | 2. Finalisasi RKA Perubahan | | - | - | ✓ | - | | |
| | Sub Kegiatan 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | - | - | - | 2.674.600,- Dokumen DPA SKPD | |
| | Rencana Aksi : Membuat Pra DPA, menginput DPA di Aplikasi, Asistensi DPA , Reviu DPA | | ✓ | - | - | - | | |
| | Finalisasi DPA Perubahan | | ✓ | - | - | - | | |
| | Sub Kegiatan 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | - | - | 1 Dokumen | - | 3.101.800 Dokumen DPA Perubahan SKPD | |
| | Rencana Aksi : Membuat Pra DPA Perubahan, menginput DPA Perubahan di Aplikasi, Asistensi DPA Perubahan, Reviu DPA Perubahan | | - | ✓ | - | - | | |
| | Finalisasi DPA Perubahan | | - | - | ✓ | - | | |
| | Sub Kegiatan 6 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil | 7 Dokumen | - | - | - | 2.001.100,- Dokumen Capaian Kinerja | |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|---|---|-----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | | | | | |
| | Rencana Aksi : 1. Pengumpulan data, penyusunan daraf LAKIP 2025, LKPJ 2025, LPPD 2025, dan Laporan Evaluasi Internal 2025 per triwulan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2. Asistensi LAKIP 2025, LKPJ 2025, dan LPPD 2025 | | ✓ | - | - | - | | |
| | 3. Finalisasi LAKIP 2025, LKPJ 2025, LPPD 2025, dan Laporan Evaluasi Internal 2025 per triwulan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Sub Kegiatan 7 Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen | - | - | - | 2.179.300,- | Dokumen SAKIP |
| | Rencana Aksi : 1. Mengumpulkan Data Evaluasi Kinerja 2025 | | ✓ | - | - | - | | |
| | 2. Menyetor Dokumen Evaluasi Kinerja 2025 kepada Inspektorat Daerah | | ✓ | - | - | - | | |
| | 3. Melakukan Revisi Dokumen Evaluasi kinerja 2025 atas Review Inspektorat Daerah | | ✓ | - | - | - | | |
| | 4. Mengimput Dokumen Evaluasi Kinerja 2025 pada Aplikasi | | ✓ | - | - | - | | |
| | | | | | | | | |
| | Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia | | | | | | |
| | Sub Kegiatan 1 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang | 26 Orang | 26 Orang | 26 Orang | 3.022.474.000 | |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | | | | | | | |
| | Rencana Aksi: 1. Mengambil ampra gaji pada Bidang Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2. Membuat SPM dan SPP kekurangan Gaji | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 3. Membuat daftar potongan gaji | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 4. Membuat SPM dan SPP Gaji | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 5. Membuat Konsep kenaikan gaji berkala (KGB) ASN | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Sub Kegiatan 2 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen | | | | 3.000.000,- | |
| | Rencana Aksi: 1. Pengumpulan data, penyusunan draf Laporan Keuangan | | ✓ | - | - | - | | |
| | 2. Asistensi LK dan Finalisasi LK | | ✓ | - | - | - | | |
| | Sub Kegiatan 3 penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 3.000.000,- | |
| | Rencana Aksi: 1. Pengumpulan data, penyusunan draf Laporan Keuangan Semesteran | | - | ✓ | - | - | | |
| | 2. Asistensi LK dan Finalisasi LK Semesteran | | - | ✓ | - | - | | |
| | Sub Kegiatan 4 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 4.000.000,- | |
| | Rencana Aksi: | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|--|-----------|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| | 1. Pengumpulan data, penyusunan draf Laporan RFK | | | | | | | |
| | 2. Asistensi RFK dan Finalisasi RFK | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | | | | | | | |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota | <ul style="list-style-type: none"> Persentase Capaian Kinerja (%) Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%) | 25% | 25% | 25% | 25% | | |
| | Kegiatan 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | - | 2 Dokumen | 1 Dokumen | - | 11.000.000,- | |
| | Sub Kegiatan 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 3.000.000,- | RKBMD, RKBU |
| | Rencana Aksi: <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data | | | ✓ | | ✓ | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Pengimputan data pada aplikasi | | | ✓ | | ✓ | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Asistensi | | | ✓ | | ✓ | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Finalisasi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | ✓ | | ✓ | | |
| | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan 2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,- | Dokumen Rekonsiliasi Aset |
| | Rencana Aksi : <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Penyusunan Rekonsiliasi Barang | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Penyusunan Rekonsiliasi Persediaan Barang | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Sub Kegiatan 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,- | Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|---|-----------|--------|-------|--------|-------|------------------|--------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| | Rencana Aksi : Mengumpulkan bahan KIB, KIR dan Aset Tetap | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Melakukan Penyusunan KIB, KIR dan Aset Tetap | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Melakukan Asistensi | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Memfinalisasi dokumen KIB, KIR dan Aset Tetap | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | | | | | | | |

Sasaran 2

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target 2025 | | | |
|-----|---|--|-------------|-------|--------|----------------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat | Indeks kepuasan layanan non SPM urusan Penanaman Modal | - | - | - | 80,00 % |

Rencana Aksi 2

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|---|---|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota | 3. Persentase Capaian Kinerja (%) 4. Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%) | 25% | 25% | 25% | 25% | | |
| | Kegiatan 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | - | 2 Dokumen | 1 Dokumen | - | 10.000.000,- | |
| | Sub Kegiatan 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 3.000.000,- | RKBMD, RKBU |
| | Rencana Aksi: | | | ✓ | | ✓ | | |
| | 1. Pengumpulan data | | | ✓ | | ✓ | | |
| | 2. Pengimputan data pada aplikasi | | | ✓ | | ✓ | | |
| | 3. Melakukan Asistensi | | | ✓ | | ✓ | | |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| | 4. Finalisasi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | ✓ | | ✓ | | |
| | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan 2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,- | Dokumen Rekonsiliasi Aset |
| | Rencana Aksi : 1. Melakukan Penyusunan Rekonsiliasi Barang | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2. Melakukan Penyusunan Rekonsiliasi Persediaan Barang | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Sub Kegiatan 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,- | Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah |
| | Rencana Aksi : 1. Mengumpulkan bahan KIB, KIR dan Aset Tetap | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2. Melakukan Penyusunan KIB, KIR dan Aset Tetap | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 3. Melakukan Asistensi | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 4. Memfinalisasi dokumen KIB, KIR dan Aset Tetap | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | | | | | | | |

Sasaran ke 3

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target 2024 | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|--------|--------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1 | Meningkatnya Kerjasama investasi | Nilai Investasi PMDN (Rp Juta) | | | | 28.297 |
| | | Nilai Investasi PMA (\$ Juta) | | | | 1.164 |

Rencana aksi 3

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|--|--|--------|--------|--------|--------|---------------|--|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| 1 | Program Promosi Penanaman Modal | Jumlah Investor PMDN/PMA | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | | |
| | Kegiatan 1. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota | Jumlah Penerimaan Misi Penanaman Modal | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 275.521.000 | |
| | Sub Kegiatan 1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 275.521.000 | Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten /Kota |
| | Menyusun KAK Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi | | ✓ | | | | | |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|----------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| | Menyusun SK TIM Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi | | ✓ | | | | | |
| | Menyiapkan Rapat TIM Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi | | | ✓ | ✓ | | | |
| | Pengumpulan Bahan Dokumen Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Penyusunan Dokumen Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Melaksanakan Asistensi | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Finalisasi Dokumen Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 2 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase potensi untuk peluang Investasi Daerah (%) | 60% | 60% | 60% | 60% | 10.000.000 | |
| | Kegiatan 1 Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah | 15 Perusahaan | | | | 10.000.000 | |
| | Sub Kegiatan 1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000 | Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|----------|---|--|------------------------|-------|--------|-------|--------------------|--|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| | Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal |
| | Rencana Aksi : Pengumpulan bahan Perda Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Penyusunan Perda Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Melakukan Asistensi | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Finalisasi Perda Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 1 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah) | 67.000 | | | | 140.000.600 | |
| | Kegiatan 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah) | 67.000 | | | | 140.000.600 | |
| | Sub Kegiatan 1 Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 20 pelaku usaha | | | | 65.000.000 | Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal |
| | Rencana aksi : | | | | | | | |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|--|-----------|--------|-------|--------|-------|------------------|--------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| | Membuat SK Tim Terpadu , KAK Terkait Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | | ✓ | ✓ | | | | |
| | Membuat SK Internal Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha | | ✓ | ✓ | | | | |
| | Melakukan rapat untuk Menentukan lokasi Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait sehubungan dengan akan dilaksanakannya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|---|--|-----------------------------|-------|--------|-------|-------------------|--|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| | Melaksanakan Bimbingan Teknis/Sosialisasi implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mengidentifikasi Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Menyelesaikan Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Sub Kegiatan 2 Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | 8 Usaha/Kegiatan | | | | 65.000.600 | Berapa Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Pengawasan Pelaku Usaha |
| | Rencana Aksi Membuat SK, KAK Terkait Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | | ✓ | ✓ | | | | |
| | Melaksanakan Analisa dan Verifikasi data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | | ✓ | ✓ | | | | |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|---|---|-----------------------------|-------|--------|-------|-------------------|--|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| | . Melaksanakan Inspeksi Lapangan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | . Melaksanakan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Sub Kegiatan 3 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya | 4 Kegiatan Usaha | | | | 10.000.000 | Berapa pelaku usaha yang diselesaikan permasalahan/ hambatan kegiatan usahanya |
| | . Rencana Aksi Membuat SK, KAK Terkait Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | . Mengidentifikasi pelaku usaha/ perusahaan dengan cara mengunjungi pelaku usaha atau perusahaan | | | ✓ | | | | |
| | . Mengidentifikasi daftar pelaku usaha/ perusahaan yang mempunyai permasalahan yang sama untuk diadakan pertemuan atau rapat | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | . Membuat SPJ realisasi kegiatan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Sasaran 4

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target 2025 | | | |
|-----|---|--|-------------|-------|--------|-------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive | Persentase izin usaha dan investasi yang dikeluarkan | | | | 100% |

Rencana Aksi 4

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase izin yang di terbitkan (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 60,180,000 | |
| | Kegiatan 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penerbitan Izin Perizinan dan Non Perizinan | 1500 izin | | | | 60,180,000 | |
| | Sub Kegiatan 1 Penyediaan dan Pengolahan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 300 Pelaku usaha | 400 Pelaku usaha | 400 Pelaku usaha | 400 Pelaku usaha | 45.420.000 | |
| | Rencana aksi : | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|--|---|-------------------------|-------|--------|-------------------------|-------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| | 1. Menerima masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi dan pengaduan | | | | | | | |
| | 2. Mendaftarkan identitas masyarakat | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 3. Menyelesaikan permasalahan sesuai tingkat aduan dan konsultasinya | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 4. Membuat Laporan hasil konsultasi dan aduan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Sub Kegiatan 2 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal | 3 kegiatan usaha | | | 3 kegiatan usaha | 12.600.000 | Dokumen Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal |
| | Rencana Aksi : 1. Penyusunan rencana pemantauan Usaha Beresiko Tinggi dan Menengah Tinggi | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2. Menyusun Personil yang akan melakukan pemantauan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 3. Pelaksanaan Pemantauan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| | 4. Laporan Hasil Pemantauan Pemenuhan Komitmen | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 2.291 pelaku usaha | Sub Kegiatan 3 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1500 pelaku usaha | pelaku usaha | pelaku usaha | 2.291 pelaku usaha | 65.000.000 | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin |
| | Rencana Aksi : 1. Menerbitkan Registrasi Pemohon Izin | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2. Melakukan Proses Berkas | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 3. Menerbitkan Izin | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Sub Kegiatan 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | - | | 1 dokumen | | 12.000.000 | |
| | Rencana Aksi: 1. Menerima permohonan fasilitas / Insentif Daerah Daerah dari Pengusaha | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2. Mengkoordinasikan permohonan kepada tim penilai pemberian fasilitas dan Insentif Daerah | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 3. Menyampaikan ke pemohon terkait hasilpenilaian kelayakan pemberian fasilitas / pemberian insentif | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Anggaran (Rp) | Output |
|-----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 14.980.000 | |
| | Kegiatan 1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima | 100% | 100% | 100% | 100% | 14.980.000 | |
| | Sub Kegiatan 1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kab/kota | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 14.980.000 | Laporan pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan sistem informasi |
| | Rencana Aksi : 1. Menerima dan mencatat permintaan Data sektor baik secara rutin perbulan ke OPD maupun permintaan informasi izin bagi yang membutuhkan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2. Memberikan data penerbitan izin setiap bulannya kepada instansi teknis | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 3. Menginformasikan data terkait perizinan melalui website resmi | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

2.5. Capaian Kinerja

Adapun hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Triwulan IV tahun 2025 seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Realisasi Capaian Rencana Aksi Sasaran Strategis tahun 2025

| NO | URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET 2025 | REALISASI 2025 | CAPAIAN (%) | Ket. |
|----|--|--------|-------------|----------------|---------------|------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | $5=(4/3)*100$ | 6 |
| | Dinas PMPTSP | | | | | |
| | Urusan Penanaman Modal | | | | | |
| 1. | Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP | % | 75,00 (B) | 75,74 | 108,2 | |
| 2. | Nilai SAKIP Dinas PMPTSP | % | 75,00 (B) | 67,35N (B) | 89,80 | |
| 3. | Laporan Keuangan OPD sesuai SAP | Sesuai | Sesuai | Sesuai | 100 % | |
| 4. | Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 80 | 89,55 | 111,93 | |
| 5. | Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA) | % | 12,00 | 14,19 | 118,25 | |
| 6. | Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional | % | 20 | 203,47 | 1.017,35 | |
| 7. | Persentase peningkatan nilai investasi PMA | % | 8,00 | 700,89 | 8.761,12 | |
| 8. | Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik | % | 88,00 | 89,55 | 101,76 | |

Sumber Data: Dinas PMPTSP , Desember 2025

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Terlihat bahwa rata-rata target melebihi realisasi capaiannya, seperti Laporan Keuangan OPD sesuai SAP ini ditunjang dengan adanya penggunaan aplikasi SIPD dan Manca yang terintegrasi. Begitu pula dengan capaian persentase peningkatan nilai investasi PMA dan nilai investasi PMDN juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Persentase peningkatan nilai investasi PMA (Juta Rupiah) Tahun 2025 memperoleh Realisasi sebesar **Rp. 9.325.170.413,-** dengan capaian sebesar 8.761,12%. Capaian tersebut jika di dasarkan pada skala nilai peringkat kinerja tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 maka memperoleh peringkat **kategori sangat tinggi**

disebabkan oleh intensifnya tim agen pelaporan LKPM (Dinas PMPTSP) dalam melakukan pengawasan penanaman modal.

2.6. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut ini:

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator | Target | REALISASI | Persentase Capaian Kinerja Keuangan | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah | Laporan Keuangan OPD sesuai SAP | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Kinerja (%) | 71,51% | 67,35 % | | | | | | |
| | | | | Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%) | 91,00% | 92,44% | | | | | | |
| | | | | | Rp. 3.675.160.155,- | Rp. 3.424.248.876 | 85,14 % | | | | | |
| | Laporan Kinerja Sesuai metode SILAJARA | | | a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | 18.956.800,- | 15.484.600,- | 83,82% | | | | |
| | | | | 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan, jumlah Dokumen Renstra PD yang di susun dan ditetapkan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | | | | | |
| | | | | | | 3.000.000,- | 2.949.000,- | 98,32% | | | | |
| | | | | 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | |
| | | | | | | 3.000.000,- | 2.949.690,- | 98,32 % | | | | |
| | | | | 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD | Jumlah Dokumen RKA perubahan yang tersusun | 1Dokumen | 1Dokumen | | | | | |
| | | | | | | 2.967.800,- | 2.818.000,- | 94,96 % | | | | |
| | | | | 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA pokok yang tersusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | |
| | | | | | | 3.000.000,- | 2.970.760,- | 99,03 % | | | | |
| | | | | 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD | Jumlah Dokumen DPA perubahan yang tersusun | 1 Dok | 1 Dok | | | | | |
| | | | | | | 2.674.000,- | 2.463.850,- | 92,12 % | | | | |
| | | | | 6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan | 2 Laporan | 2 Laporan | | | | | |
| | | | | | | 1.851.300,- | 1.819.010,- | 98,30 % | | | | |
| 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen evaluasi kinerja (LAKIP, LPPD, LKPJ, RKPD SKPD) perangkat daerah yang tersusun dan dilaporkan | 4 Laporan | 4 Laporan | | | | | | | | | |
| | | 2.023.500,- | 1.893.780,- | 93,59 % | | | | | | | | |
| | | | b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan yang akuntabel yang disusun | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 2.767.545.155,- | 2.5518.47.909,- | 92,21 % | | | | | |
| | | | 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | 26 Orang/Bulan | 26 Orang/Bulan | | | | | | |
| | | | | | 2.762.232.155,- | 2.547.046.809,- | 92,21 % | | | | | |
| | | | | | 1 Dok | 1 Dok | | | | | | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator | Target | REALISASI | Persentase Capaian Kinerja Keuangan | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|-------------------|-------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun | 3.000.000,- | 2.734.850,- | 91,16 % | | |
| | | | 3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran yang tersedia | 1 Laporan 0,- | 1 Laporan 0,- | 100 % | | |
| | | | 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | 15 Dokumen 2.313.000,- | 15 Dokumen 2.066.250,- | 89,33 % | | |
| | | | c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah | 100% 8.933.300,- | 100% 8.435.450,- | 94,42 % | | |
| | | | 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Barang milik Daerah SKPD yang disusun dan dilaporkan | 2 Dok 1.322.800,- | 2 Dok 1.176.600,- | 88,95 % | | |
| | | | 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan | 2 Dok 5.000.000,- | 2 Dok 4.859.800,- | 97,20 % | | |
| | | | 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan | 2 Dok 2.610.500,- | 2 Dok 2.399.650,- | 91,92 % | | |
| | | | d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah | 100% 177.239.500,- | 100 % 170.247.377,- | 96,05 % | | |
| | | | 1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia | 2 Paket 9.821.500,- | 2 Paket 9.821.500,- | 100 % | | |
| | | | 2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 5 Dokumen 7.620.000,- | 5 Dokumen 7.400.000,- | 97,11 % | | |
| | | | 3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terselenggara | 100 Laporan 159.798.000,- | 100 Laporan 159.685.877,- | 99,93 % | | |
| | | | e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang tersedia | 100% 165.675.000,- | 100% 165.675.000 | 91,98 % | | |
| | | | 1) Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator | Target | REALISASI | Persentase Capaian Kinerja Keuangan | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 2) Pengadaan mebel | Jumlah peralatan mobiler yang tersdia | | | | | |
| | | | 3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia | 2 Unit 165.675.000 | 2 Unit 152.386.800,- | 100% 91,98 % | | |
| | | | f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% 420.834.950,- | 100% 413.743.148,- | 98,31 % | | |
| | | | 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah layanan telepon, listrik, dan air yang tersedia | 3 Laporan 146.212.750,- | 3 Laporan 144.106.948,- | 98,56 % | | |
| | | | 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Layanan umum Kantor yang tersedia | 3 Laporan 300.000.000,- | 3 Laporan 297.001.095,- | 98,79 % | | |
| | | | g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara | 32 unit 128.460.000,- | 32 unit 127.422.297,- | 99,19 % | | |
| | | | 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan kendaraan dinas atau operasional lapangan | Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | 12 unit 31.960.000,- | 12 unit 31.628.187,- | 98,96 % | | |
| | | | 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara | 25 Unit 41.420.000,- | 25 Unit 41.420.000,- | 100 % | | |
| | | | 3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara | 1 Jenis 10.450.000,- | 1 Jenis 10.432.000,- | 99,83 % | | |
| | | | 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 2 Unit 44.630.000,- | 2 Unit 43.942.110,- | 98,46 % | | |
| 2 | Meningkatnya Investasi | Nilai Investasi PMDN (Rp Juta) | Program Promosi Penanaman Modal | Jumlah Investor PMDN/PMA | 22 Perusahaan 121.723.000,- | 1.878 80.212.700,- | 65,90 % | | |
| | | Nilai Investasi PMA (\$ Juta) | Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota | Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal | 3 Kali 121.723.000,- | 7 Kali 80.212.700,- | 65,90 % | | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator | Target | REALISASI | Persentase Capaian Kinerja Keuangan | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-----|-------------------|-------------------|--|--|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting yang dilaksanakan | - | - | - | | |
| | | | | Kegiatan pameran penanaman modal | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% | | |
| | | | | | 121.723.000,- | 80.212.700,- | 65,90 % | | |
| | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah) | 52.000 | 76.286 | | | |
| | | | | | 124.198.300,- | 122.492.913,- | 98.62 % | | |
| | | | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah) | 56.000 | | | | |
| | | | | | 124.198.300,- | 122.492.913,- | 98.62 % | | |
| | | | 1) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha | Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang terfasilitasi | 204 pelaku usaha | 251 pelaku usaha | | | |
| | | | | | 50.234.000,- | 48.947.063,- | 97.44 % | | |
| | | | 2) Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang diawasi | 60 Kegiatan Usaha | | | | |
| | | | | | 73.964.300,- | 73.545.850,- | 99.43 % | | |
| | | | 3) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 4 kegiatan usaha | - | 0% | | |
| | | | | | 10.000.000,- | 3.554.881,- | 35,54% | | |
| | | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah (%) | 60% | % | | | |
| | | | | | 4.601.000,- | 0,- | 0 % | | |
| | | | kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | | |
| | | | | | 4.601.000,- | 0,- | 0 % | | |
| | | | 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dan kemudahan Penanaman Modal | Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif yang tersedia | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | | |
| | | | | | 4.601.000,- | 0,- | 0 % | | |
| | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Izin yang diterbitkan (%) | 100% | 100%,- | | | |
| | | | | | 75.939.100,- | 73.870.780 | 97,28% | | |
| | | | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan | 1400 izin | 1.315 Izin | | | |
| | | | | | 75.929.100,- | 73.870.780,- | 97,28 % | | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator | Target | REALISASI | Persentase Capaian Kinerja Keuangan | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|---|--|-------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah izin yang terbit | 1400 Pelaku Usaha | 776 Pelaku Usaha | | | |
| | | | | | 47.819.100,- | 45.760.780,- | 95,70 % | | |
| | | | 2) Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Riesiko | Jumlah Dokumen Kegiatan pemantauan Komitmen Perizinan Penanaman Modal yang tersedia | 13 Kegiatan Usaha | 13 Kegiatan Usaha | | | |
| | | | | | 5.700.000,- | 5.700.000,- | 100 % | | |
| | | | 3) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Jumlah Dokumen Kegiatan Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang tersedia | 4 Pelaku Usaha | 4 Pelaku Usaha | | | |
| | | | | | 22.410.000,- | 22.410.000,- | 100 % | | |
| 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | - | - | | | | | | |
| | | - | - | | | | | | |
| | | | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%) | 100% | 100% | 91,21 % | | |
| | | | | | 14.980.000,- | 13.662.664,- | | | |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima | 100% | 100% | 91,21 % | | |
| | | | | | 14.980.000,- | 13.662.664,- | | | |
| Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah laporan berupa data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kab/kota | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | | | | | |
| | | 14.980.000,- | 13.662.664,- | 91,21 % | | | | | |

Sumber: RFK bulan Desember Dinas PMPTSP

Tabel 2.6 di atas menunjukkan realisasi anggaran tahun 2025 dari 36 sub kegiatan sebesar **Rp. 3.718.042.814,-** atau **92,44%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 4.022.134.500,-** dengan demikian terdapat sisa pagu sebesar **Rp. 304.091.686,-**. Meskipun persentase serapan anggaran masih tergolong tinggi. Besaran angka tersebut disebabkan karena realisasi anggaran dari beberapa kegiatan yang tidak mencapai 100% utamanya pada kegiatan Promosi Penanaman Modal yang disebabkan karena adanya belanja perjalanan dinas luar negeri yang tidak terlaksana. Kegiatan lainnya yang tidak mencapai 100% realisasi terdapat pula pada kegiatan pengadaan peralatan mesin dan lainnya yang dikarenakan perbedaan harga barang dan di e-katalog

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan pencapaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentunya tidak terlepas daripada faktor pendukung dan faktor penghambat serta faktor intenal dan eksternal terhadap realisasi capaian rencana aksi yang telah dicapai. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung berdasarkan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Faktor Pendukung dan Penghambat realisasi capaian

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat |
|------------|---|--|--|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | Dibutuhkan perencanaan anggaran yang lebih baik agar pemenuhan sarana dan prasarana serta komunikasi MPP dapat dilengkapi guna kenyamanan pengunjung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana MPP yang belum mendukung 2. Belum optimal proses pelayanan PTSP pada pelayanan perizinan sesuai dengan SOP sebab tidak semua Tim Teknis bergabung di MPP setiap hari kerja 3. Keterbatasan anggaran |
| 2 | Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah | Laporan Keuangan OPD sesuai SAP | 1. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini 2. Keterbatasan anggaran |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat |
|-----|--|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya Kerjasama investasi | Nilai Investasi PMDN (Rp Juta) Nilai Investasi PMA (\$ Juta) | Melakukan revisi terhadap regulasi yang mengarah kepada pemberian insentif kepada investor | 1. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi 2. Tidak semua investor membuat laporan /LKPM melalui aplikasi OSS |
| 4 | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive | Persentase izin usaha dan investasi yang dikeluarkan | 1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu | 1. Sarana dan prasarana MPP yang belum mendukung 2. Belum optimal proses pelayanan PTSP pada pelayanan perizinan sesuai dengan SOP sebab tidak semua Tim Teknis bergabung di MPP setiap hari kerja |

BAB III

PENUTUP

Rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2025, namun juga sebagai tolak ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/hambatan yang timbul.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan professional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Benteng, 31 Desember 2025

Kepala Dinas PMPTSP



Hj. Andi Ros Irma, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda IV. C

NIP. 197010011992032013